

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen utama komunitas global sejak disepakatinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 (Sachs *et al.*, 2023). SDGs yang memuat 17 tujuan dan 169 target dirancang sebagai kerangka kerja global untuk mengakhiri kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2030 (Arifianti & Widianingsih, 2023). Namun, berdasarkan laporan *Sustainable Development Report 2023* yang disusun oleh Sachs *et al.* (2023), capaian implementasi SDGs secara global masih tergolong rendah, di mana dunia baru mencapai sekitar 15% dari target yang seharusnya telah terpenuhi pada fase ini, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dan realisasi empiris di lapangan.

Indonesia telah memperkuat komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun 2023 berdasarkan SDGs Index, Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 166 negara dengan skor 70,2, sedangkan Finlandia menduduki urutan pertama dengan skor 86,6 (Sachs *et al.*, 2023). Artinya, skor Indonesia masih cukup jauh untuk mencapai 17 tujuan SDGs tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa proses Indonesia untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan memerlukan sinergi yang lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna memastikan akselerasi pencapaian target SDGs secara lebih efektif dan terintegrasi (Arifianti & Widianingsih, 2023).

Kesadaran bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai SDGs mendorong perubahan pandangan terhadap peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor dengan dampak lingkungan besar, tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Surianti & Gresya, 2024). Oleh karena itu, tata kelola lingkungan perusahaan menjadi penting, karena pengelolaan dampak lingkungan, keterbukaan informasi keberlanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang akan menentukan kontribusi perusahaan terhadap pencapaian SDGs (Setiawan *et al.*, 2024).

Dalam penelitian Schiemann & Tietmeyer (2022) dan Kurniawan & Fitranita (2024) perkembangan dunia usaha yang semakin menekankan keberlanjutan, terdapat dua instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya, yaitu *Green Accounting* dan *ESG Disclosure*. *Green Accounting* atau akuntansi lingkungan merupakan pengembangan dari akuntansi konvensional yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Konsep ini muncul karena selama ini biaya kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan sering kali tidak dicatat dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan menjadi kurang lengkap dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan (Qian *et al.*, 2018). Dengan mencatat biaya seperti pengelolaan limbah, pemulihan lingkungan, dan investasi pada teknologi ramah lingkungan, perusahaan dapat menunjukkan kinerja yang lebih transparan dan realistis (Rohmiatun *et al.*, 2025).

Sementara itu, *ESG Disclosure* adalah pengungkapan informasi mengenai aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) perusahaan kepada publik dan investor (Schiemann & Tietmeyer, 2022).

Berdasarkan laporan McKinsey (2023), sekitar 89% investor global kini mempertimbangkan faktor ESG dalam keputusan investasinya. Artinya, perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen dan transparansi terhadap keberlanjutan berisiko kehilangan minat investor dan kepercayaan pasar. Tingkat keterbukaan informasi ESG mencerminkan keseriusan perusahaan dalam memenuhi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Penelitian dari Wahyuni *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan ESG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan biaya modal, serta memperkuat reputasi perusahaan. Di era dimana keberlanjutan menjadi kriteria utama investasi, keterbukaan ESG berperan sebagai sinyal positif bagi pasar bahwa perusahaan mampu mengelola risiko lingkungan dan sosial secara efektif.

Transisi ini tidak hanya didorong oleh isu lingkungan global, tetapi juga didorong oleh peningkatan tuntutan regulasi di tingkat nasional (Kurniawan & Fitranita, 2024). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan serta mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis. Selain itu, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong perusahaan agar tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga berinovasi dalam pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab sosial (Surianti & Gresya, 2024). Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang menentukan reputasi dan akses pembiayaan perusahaan (Endiana *et al.*, 2020).

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap praktik keberlanjutan, sektor bahan baku menjadi salah satu sektor yang paling banyak disoroti (Sabrina *et al.*, 2025). Perusahaan yang bergerak pada sub-sektor pertambangan, kimia, kehutanan, pengolahan logam, serta industri dasar lainnya termasuk kelompok dengan dampak lingkungan terbesar di antara perusahaan yang terdaftar di BEI (Melawati & Rahmawati, 2022). Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas dan pengolahan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan emisi, pencemaran, serta kerusakan lingkungan. Di satu sisi, sektor ini merupakan kontributor utama terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang menjadi fokus SDGs. Namun di sisi lain, sektor bahan baku juga memiliki peluang besar untuk memberikan dampak positif apabila praktik *Green Accounting* dan *ESG Disclosure* diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan.

Somantri & Sudrajat, (2023) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2020-2022 menemukan bahwa penerapan *Green Accounting* di kalangan emiten Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan, di mana sebagian besar perusahaan baru sebatas memenuhi *compliance minimum* tanpa benar-benar mengadopsi prinsip akuntansi lingkungan secara komprehensif dalam pengambilan keputusan bisnis mereka. Lebih lanjut, penelitian oleh Prasetyo & Wicaksono, (2023) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan SDGs di Indonesia secara umum masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya 8% berdasarkan *business action* dan 20% berdasarkan target SDGs dari analisis *sustainability report* lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih memandang pelaporan

keberlanjutan sebagai sarana komunikasi publik, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis yang benar-benar terintegrasi dengan tujuan SDGs.

Konsep nilai perusahaan (*Nilai Perusahaan*) memiliki peran yang lebih strategis daripada sekadar sebagai indikator kinerja keuangan. Dalam kerangka *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman (1984), nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh profitabilitas jangka pendek, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Temuan serupa juga disampaikan oleh McKinsey & Company (2020), bahwa perusahaan yang mampu mengintegrasikan *Green Accounting* dan ESG *Disclosure* secara konsisten dan transparan cenderung memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Peningkatan nilai perusahaan ini selanjutnya memberikan kapasitas keuangan yang lebih besar untuk mendukung investasi pada program-program yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (Pamungkas *et al.*, 2024). Dengan demikian, nilai perusahaan dapat dipahami sebagai penghubung strategis antara praktik keberlanjutan perusahaan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu telah memberikan berbagai temuan mengenai hubungan antara ESG, *Green Accounting*, nilai perusahaan, dan SDGs. Studi analisis oleh Friede *et al.* (2015) terhadap lebih dari 2.200 penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% studi menemukan hubungan non-negatif antara kinerja ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Adnyana *et al.* (2024) dan Kurniawan & Fitranita (2024) mengungkapkan bahwa *Green Accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap SDGs. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan Surianti & Gresya (2024)

yang menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Selanjutnya penelitian dari Bose *et al.* (2024) dan Rifai & Ramadhan (2025) menunjukan hubungan positif signifikan antara ESG *Disclosure* dengan SDGs. Selain itu, penelitian oleh Waal & Thijssens (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang secara eksplisit mengintegrasikan SDGs dalam laporan keberlanjutannya cenderung memiliki skor ESG lebih tinggi dan kinerja bisnis yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, terdapat kekosongan penelitian yang signifikan dalam hal pengujian peran mediasi nilai perusahaan secara simultan dalam rantai hubungan antara *Green Accounting*, ESG *Disclosure*, dan pencapaian SDGs. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, baru Pamungkas *et al.* (2024) yang mencoba mengkonstruksi model mediasi serupa, namun masih terbatas pada penggunaan *Green Accounting* sebagai variabel independen tunggal dan hanya mengukur satu dimensi CSR, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif tentang mekanisme transmisi yang sesungguhnya bekerja. Tidak ada penelitian yang secara simultan menempatkan *Green Accounting* dan ESG *Disclosure* sebagai independen ganda, nilai perusahaan sebagai mediator, dan pencapaian SDGs sebagai variabel dependen, terutama dalam konteks spesifik sektor bahan baku di BEI pada periode 2021-2024 yang mencakup fase pemulihan pasca-pandemi dan implementasi gelombang baru regulasi keberlanjutan OJK.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji **“Pengaruh *Green Accounting* dan ESG *Disclosure* terhadap Pencapaian SDGs dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Perusahaan Sektor Bahan Baku di BEI Periode 2021-2024)”**. Periode penelitian ditetapkan selama rentang empat tahun karena didasarkan pada ketersediaan

data yang lengkap dan konsisten selama periode tersebut, sehingga mendukung analisis yang lebih akurat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi berkelanjutan, serta menjadi dasar bagi manajemen, investor, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi bisnis yang sejalan dengan agenda keberlanjutan nasional dan global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Green Accounting* memiliki pengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
2. Apakah penerapan *ESG Disclosure* memiliki pengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
3. Apakah nilai perusahaan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Green Accounting* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
4. Apakah nilai perusahaan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *ESG Disclosure* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Green Accounting* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
2. Menguji dan menganalisis penerapan *ESG Disclosure* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
3. Menguji dan menganalisis peran nilai perusahaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Green Accounting* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
4. Menguji dan menganalisis peran nilai perusahaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *ESG Disclosure* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI periode 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi, khususnya pada bidang *Green Accounting* dan pengungkapan ESG, serta kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada sektor bahan baku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan sektor bahan baku terkait pentingnya penerapan *Green Accounting*

yang efektif untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan melalui ESG

Disclosure.

- b. Bagi regulator dan pemerintah, menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi atau pedoman yang mendorong perusahaan menerapkan praktik pelaporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel.
- c. Bagi investor dan pemangku kepentingan, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- d. Bagi akademisi dan mahasiswa, menjadi referensi bagi pengembangan kajian akademis dan bahan pembelajaran di bidang akuntansi, manajemen, dan keberlanjutan perusahaan.